Implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) Program Based on George C. Edward III's Policy Implementation Model in Kajeksan Village

[Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berdasarkan Model Implementasi Kebijakan Edward III di Desa Kajeksan]

Ismawati[1)], Hendra Sukmana [*,2)]

[1)]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
[2)] Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
*hendrasukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Kajeksan Village. BPNT is a social assistance program distributed through a non-cash mechanism to low-income communities to help meet their basic food needs. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation with informants consisting of village officials and BPNT e-warong agents. This study uses the policy implementation model of George C. Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results reveal several dynamics in its implementation, including technical constraints in the use of the SIKS-NG application, changes in data that resulted in a decrease in the number of beneficiary families (KPM), and delays in the disbursement process. These findings highlight the importance of improving data management accuracy and strengthening technical support for information systems to enhance the effectiveness of BPNT implementation at the village level.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan. BPNT merupakan program bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Penelitian ini menggunakan pendekataan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas aparatur desa dan agen BPNT e-warong. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menemukan beberapa dinamika dalam pelaksanaannya, seperti kendala teknis pada penggunaan aplikasi SIKS-NG, perubahan data yang menyebabkan penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta keterlambatan dalam proses pencairan bantuan. Temuan ini menunjukkan pentingnya peningkatan akurasi pengelolaan data dan dukungan teknis sistem informasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BPNT di tingkat desa.*

Kata Kunci *– Policy Implementation, BPNT, Social Assistance Program, Public Policy, Kajeksan Village*

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan sosial utama di Indonesia yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan perlindungan sosial sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Amelia, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan perlindungan sosial terus dikembangkan pemerintah sebagai instrumen untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Pratama et al., 2024).

Salah satu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non-tunai kepada keluarga penerima manfaat melalui mekanisme kartu elektronik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendorong transparansi dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial. Program bantuan sosial pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui distribusi bantuan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi program ini sangat

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

bergantung pada kualitas koordinasi antar pelaksana di tingkat lokal serta kesiapan sistem administrasi yang digunakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola implementasi memiliki peran krusial dalam menentukan capaian program (Pratama et al., 2024; Wahyuni et al., 2023).

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan salah satu instrumen kebijakan perlindungan sosial yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat melalui mekanisme penyaluran non-tunai yang lebih transparan dan akuntabel. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi BPNT memiliki kontribusi signifikan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berpenghasilan rendah serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin (Mahmudah & Rahman, 2025). Implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan mekanisme organisasi untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung (Islami & Mursyidah, 2024).

Sebagai bentuk perbaikan kebijakan, pemerintah kemudian mengembangkan program BPNT yang mulai disalurkan secara bertahap sejak tahun 2017 di 44 kota di Indonesia. Dalam program BPNT, pemerintah mentransfer dana bantuan kepada keluarga penerima manfaat melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Dana bantuan tersebut kemudian dapat digunakan oleh KPM untuk membeli bahan pangan seperti beras dan telur di elektronik warung gotong royong (e-Warong) yang telah ditunjuk sebagai penyalur BPNT dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin yang rentan terhadap risiko sosial. Program bantuan sosial pangan tersebut diberikan dalam bentuk tunai maupun non-tunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data utama yang memuat informasi mengenai masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial serta menjadi acuan dalam penentuan penerima bantuan sosial.

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu program bantuan sosial pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli kebutuhan pangan pada agen atau e-warung yang telah bekerja sama dengan bank penyalur (Ariyanto et al., 2021). Dalam praktiknya, pelaksanaan bantuan sosial non-tunai masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan koordinasi antar pelaksana program, serta kendala teknis dalam mekanisme penyaluran bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh sistem implementasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi di lapangan (Nursholihah, 2022; Wahyuni et al., 2023).

Program BPNT merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam klaster pertama, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat kurang mampu. Seiring dengan perkembangan implementasinya, program ini terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia dengan menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran bantuan non-tunai.

Pendataan masyarakat penerima bantuan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Aplikasi ini berfungsi untuk mengelola data penerima bantuan, memantau penyaluran bantuan sosial, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program kesejahteraan sosial. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengintegrasikan berbagai data program kesejahteraan sosial sehingga memudahkan proses pengelolaan serta pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan sosial.

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Sidoarjo, Desa Kajeksan yang terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Kajeksan dan Dusun Godekan secara rutin melaksanakan penyaluran program BPNT kepada masyarakat yang tergolong sebagai keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, mulai dari pemberian undangan kepada masyarakat penerima bantuan sebagai bentuk pemberitahuan pencairan dana BPNT hingga proses edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan bantuan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain penyaluran bantuan, pemerintah desa juga berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat terkait pengelolaan keuangan dan pemanfaatan bantuan secara produktif. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen keuangan rumah tangga, pengembangan usaha kecil, serta pemanfaatan bantuan untuk mendukung kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan dampak jangka panjang dari program bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan anggaran BPNT di Desa Kajeksan ;

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Tabel 1. Anggaran BPNT di Desa Kajeksan

No	Tahun	Jumlah KPM	Besaran Dana	Anggaran
1	2021	158 KPM	Rp200.000 / Bulan	Rp379.000.000 / Tahun
2	2022	121 KPM	Rp200.000 / Bulan	Rp290.400.000 / Tahun
3	2023	105 KPM	Rp200.000 /Bulan	Rp252.000.000 / Tahun

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan Tabel 1, Menurut dari keterangan yang peneliti dapatkan di Desa Kajeksan Pengurangan Jumlah KPM selalu terjadi setiap tahun bahkan pada saat tahun 2024 jumlah KPM hanya sekitar 90 an orang saja, ini terjadi karena beberapa faktor seperti ada yang meninggal dunia, Peningkatan Kesejahteraan ekonomi keluarga KPM maka jumlah orang yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial bisa berkurang karena lebih banyak orang yang berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perubahan Kebijakan Pemerintah ,Pemerintah dapat mengubah kriteria atau persyaratan penerima bantuan sosial, yang mungkin mengakibatkan penurunan jumlah penerima. Misalnya, pemerintah bisa saja meningkatkan batasan pendapatan untuk menerima bantuan sosial, sehingga orang-orang dengan penghasilan yang lebih tinggi tidak lagi memenuhi syarat. , Dana yang di dapatkan dari Program BPNT di Desa Kajeksan sebesar tahun 2020- Sekarang Rp200.000/bulan, Sebelum adanya kartu ATM penerima bantuan BPNT hanya mendapatkan dana Rp110.000/bulan. Dana yang diterima dari BPNT secara langsung digunakan untuk membeli bahan makanan dan barang-barang pokok yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari keluarga penerima manfaat **.** Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan yang langsung bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, sambil juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui partisipasi warung dan kios kecil sebagai Agen dalam program ini. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yoan Deman (2021) berjudul "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BPNT Otonom di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis belum berjalan secara maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program tersebut yaitu masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan program BPNT, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dari pemerintah kecamatan kepada masyarakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bagi et al. (2023) yang berjudul "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala dalam proses persiapan, penyaluran, dan penggantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti kartu error, saldo kosong, serta data ganda yang menghambat proses pencairan bantuan.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Wildayantai (2023) dengan judul "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BPNT di Desa Bontosunggu telah berjalan sesuai dengan kriteria penerima bantuan dan dinilai tepat sasaran. Program BPNT juga memberikan dampak positif bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagian besar dilakukan pada tingkat kecamatan dan kelurahan dengan fokus pada efektivitas program, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta mekanisme penyaluran bantuan sosial. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi BPNT di tingkat desa dengan menggunakan perspektif model implementasi kebijakan George C. Edward III masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

Secara umum, implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan telah berjalan cukup baik. Penyaluran bantuan dilakukan secara rutin melalui agen e-warong yang telah bekerja sama dengan pemerintah desa. Selain itu, komunikasi antara aparatur desa, agen BPNT, dan masyarakat penerima manfaat juga telah terjalin dengan baik dalam proses penyaluran bantuan. Masyarakat penerima manfaat dapat menggunakan bantuan secara lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sesuai kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program BPNT telah memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala administratif dan teknis.Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen pelaksana sehingga sinergi antar unsur tersebut menjadi syarat penting tercapainya tujuan kebijakan (Mahmudah & Rahman, 2025). Transparansi dalam proses penyaluran bantuan sosial dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan (Fardi & Pratama, 2023). Hambatan implementasi kebijakan sosial seringkali berasal dari faktor administratif dan teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia serta kendala sistem informasi. Hambatan ini perlu diatasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan optimal (Imanuddin et al., 2019).

Berdasarkan Observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kajeksan dalam pelaksanaannya. Diantaranya; pertama, permasalahan pendataan masyarakat miskin, ada masyarakat yang bisa dikatakan mampu dalam hal ekonomi mendapatkan BPNT sedangkan masyarakat yang masih tergolong kurang mampu tidak mendapat BPNT dan hal itu menjadi kontra di masyarakat sekitar. Sehingga program BPNT ini pelaksanaanya masih kurang tepat sasaran bagi beberapa masyarakat miskin, kedua, Permasalahan dari sistem aplikasi SIKS-NG terkadang mengalami eror seperti data tidak sesuai, data double, dan pemerintah desa kajeksan masih kesulitan untuk mengurus menghapus data masyarakat desa yang sudah meninggal karna kelolaaplikasinya belum maksimal, ketiga permasalahan ketika pencairan dana BPNT terkadang ada masyarakat yang mengeluh kartu ATM masih kosong atau bisa dikatakan proses pencairannya telat di banding masyarakat lain di karenakan kesalahan dari data. Tentunya harapan dari masyarakat sekitar kepada pelaksanaan program BPNT ini bisa lebih di laksanakan dengan adil dan jujur, serta di harapkan pemerintahan desa kajeksan rutin melakuakan pendataan ulang KPM, agar semua masyarakat miskin di desa kajeksan merasakan program BPNT ini secara merata.

Berbagai penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah banyak dilakukan di berbagai daerah. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada tingkat kabupaten atau kecamatan dengan menyoroti efektivitas kebijakan, ketepatan sasaran penerima bantuan, serta mekanisme penyaluran program. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi BPNT pada tingkat desa masih relatif terbatas, terutama yang menelaah dinamika pelaksanaan program secara langsung pada aktor pelaksana di tingkat desa. Padahal, desa merupakan unit pemerintahan yang berperan penting dalam proses verifikasi data, koordinasi dengan agen e-warong, serta penyampaian informasi kepada masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan BPNT di tingkat desa serta memberikan kontribusi bagi penguatan implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat lokal. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam program bantuan sosial adalah akurasi data penerima manfaat. Data yang tidak mutakhir berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahan sasaran sehingga efektivitas program menjadi berkurang (Galvin et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, : a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi; b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial; c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif; d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) fragmentasi. Struktur birokrasi yang jelas dan prosedur operasional yang terstandar menjadi faktor penting dalam mendukung kinerja implementasi kebijakan. Selain itu, komitmen pelaksana juga berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat (Zulfia et al., 2023).

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan. Metode kualitatif merupakan pendekatan yang peneliti gunakan untuk menghasilkan data berupa deskripsi naratif (dalam bentuk kata-kata) dari individu dan perilaku yang diamati. Fokus peneltian menggunakan konsep teori dari metode kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dengan akurat dan sistematis, serta menjelaskan hubungan antara fenomena-fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, analisis data menjadi langkah selanjutnya dalam penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program BPNT di tingkat desa.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program BPNT. Informan penelitian dipilih dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan BPNT di tingkat desa, yaitu Kepala Dusun, Sekretaris Desa, satu agen BPNT (e-warong), serta empat orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan. Pemilihan informan dari berbagai unsur tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif serta mendukung proses triangulasi data dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Model analisis ini terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap pertama adalah pengumpulan data, yaitu proses memperoleh data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan. Data yang diperoleh berasal dari aparatur desa, agen BPNT, dan masyarakat penerima manfaat. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti memilah data yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi program BPNT, Tahap ketiga adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun gambar agar data lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan kondisi implementasi Program BPNT di Desa Kajeksan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III.Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang berbeda, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan memiliki tingkat keabsahan yang lebih baik. Informan penelitian ini meliputi:

Tabel 2. Informan Penelitian BPNT di Desa Kajeksan

NO	Informan	Jabatan	Alasan Dipilih
1	Kepala Dusun	Penanggung jawab pendataan KPM serta pelaksanaan program BPNT di tingkat dusun	Memiliki informasi mengenai proses pendataan, perubahan data KPM, serta kendala yang terjadi dalam implementasi BPNT di Desa Kajeksan
2	Sekretaris Desa	Aparatur pemerintahan desa yang terlibat dalam administrasi dan pengelolaan dan bantuan sosial	Untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan data KPM serta koordinasi pelaksanaan program BPNT di tingkat desa
3	Agen BPNT	Pelaksana transaksi e-warong	Terlibat langsung dalam penyaluran bantuan
4	4 KPM	Penerima Manfaat	Untuk mengetahui kepuasan, kendala, dan akses BPNT

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Perpres ini mengatur pelaksanaan program BPNT yang bertujuan untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin secara non-tunai. Peraturan Presiden mengenai BPNT bertujuan untuk memperkenalkan bantuan pangan non-tunai sebagai pengganti bantuan pangan berupa barang. BPNT menggunakan sistem kartu elektronik untuk mempermudah distribusi dan meminimalkan risiko penyimpangan. Ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan, serta memberikan penerima bantuan fleksibilitas dalam memilih pangan sesuai kebutuhan mereka. Hasil penelitian ini peneliti memaparkan hasil dan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan. Fokus dalam penelitian ini adalah empat variabel yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edward III oleh Karena itu keempat variabel tersebut akan diulas satu persatu untuk menjabarkan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kajeksan, Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan di Desa Kajeksan (Edward III, 1984).

A. Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi program telah dilakukan melalui sosialisasi oleh aparatur desa dan pendamping sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan warga serta penyampaian informasi secara langsung kepada keluarga penerima manfaat.

Menurut Edward III, komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan program sangat bergantung pada kejelasan informasi yang diterima oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Ketidakjelasan informasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, implementasi BPNT di Desa Kajeksan pada aspek komunikasi dapat dikategorikan cukup berjalan, namun masih memerlukan peningkatan dalam konsistensi dan kejelasan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam pengiriman kebijakan, sehingga kebijakan yang disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksana. George C. Edward III juga mengemukakan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperjelas dalam konteks komunikasi: Pertama, transmisi, yang mencerminkan bahwa pemerintah pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan, menghadapi tantangan dalam menjalankan komunikasi yang efektif. Hal ini disebabkan oleh seringnya terjadi miskomunikasi antara pemerintah setempat. Kedua, kejelasan yang menunjukkan bahwa pemerintah pelaksana BPNT di Desa Kajeksan sudah cukup berhasil dalam menyampaikan komunikasi yang jelas. Namun masih ada beberapa orang yang masih tidak memahami prosedur BPNT, sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan pendekatan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Masyarakat desa yang lebih lagi. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Indra selaku Kepala Dusun Godekan Desa Kajeksan yang mengurus sebagian besar pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kajeksan.

"*Insyaallah di Kajeksan komunikasi tentang penyaluran BPNT terjalin dengan baik bagi KPM atupun Agen BPNT kalau sudah waktunya pencairan BPNT pasti saya langsung kasih tau Agen BPNT nya melalui WA atau langsung"*

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, proses komunikasi dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan dinilai berjalan cukup baik. Informasi mengenai jadwal pencairan bantuan serta mekanisme penyaluran bantuan umumnya disampaikan melalui grup WhatsApp yang melibatkan perangkat desa, kepala dusun, serta sebagian masyarakat penerima manfaat. Media komunikasi tersebut dinilai mempermudah penyampaian informasi secara cepat dan efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi BPNT di Desa Kajeksan telah berjalan cukup baik melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi antara pemerintah desa, pendamping sosial, dan masyarakat penerima manfaat. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala komunikasi, seperti perbedaan pemahaman masyarakat mengenai prosedur program serta keterbatasan sosialisasi kepada seluruh KPM.

Dalam perspektif model implementasi kebijakan Edward III, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi secara cepat, tetapi juga menyangkut kejelasan, konsistensi, dan akurasi informasi yang disampaikan kepada seluruh pelaksana kebijakan. Dengan demikian, penggunaan media komunikasi informal seperti WhatsApp memang dapat mempercepat penyebaran informasi, tetapi tidak selalu menjamin kualitas koordinasi administratif yang berkaitan dengan validasi data penerima bantuan.

Permasalahan data ganda dan kartu kosong menunjukkan bahwa proses komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam pengelolaan data, seperti antara pemerintah desa dan sistem pendataan pada aplikasi SIKS-NG, belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi yang berlangsung lebih dominan pada aspek penyampaian informasi operasional, sementara komunikasi terkait sinkronisasi data dan verifikasi penerima bantuan masih memerlukan peningkatan koordinasi yang lebih sistematis.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Penyaluran BPNT
Sumber : Pemerintah Desa Kajeksan

Berdasarkan gambar diatas, Dapat di lihat bahwa sosialisasi penyaluran BPNT di Desa Kajeksan Sudah berjalan dengan baik dan dan lancar setiap bulannya, ini mencerminkan bahwa pemerintah Kajeksan sangat patuh terhadap aturan, transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa bantuan pangan sampai ke tangan yang tepat dengan cara yang efisien dan bermanfaat Bagi KPM. Menurut informasi yang peneliti dapatkan di lapangan dari keterangan Agen BPNT langsung bahwa BPNT di Desa Kajeksan di cairkan dua bulan sekali, berikut wawancara dengan Ibu Khoiri :

"BPNT sebetulnya satu bulan sekali ya tapi turunnya itu dua bulan sekali kalau jatahnya sekali turun Rp400.000 biasanya, ga gampang mbak jadi agen bpnt soalnya sulit sekali dapet izin dari dinsos sama banknya, kalau dari bank mudah dapet izinnya tapi kalau dari dinsos kan tidak tentu di kasih izin, sulit"

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa, untuk menjadi Agen BPNT pun harus terdaftar dan mendapatkan izin yang sah baik itu dari Dinas Sosial atau Bank yang bekerja sama. Proses yang dilakukan pemerintah di desa dalam penyaluran BPNT melalui media massa kemudian tatap muka dan memberikan sosialisasi kepada KPM Setelah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) cair di desa, proses penyalurannya umumnya melibatkan beberapa langkah: 1). Pencairan Dana: Dana BPNT dikirim dari pemerintah pusat ke rekening bank yang telah ditunjuk untuk desa tersebut. 2).Pengumuman dan Informasi Pemerintah desa biasanya mengumumkan kepada masyarakat mengenai pencairan dana BPNT dan jadwal penyalurannya. 3). Penerimaan dan Verifikasi: Pihak desa, sering kali melalui petugas atau pengurus yang ditunjuk, akan memverifikasi data penerima manfaat dan memastikan bahwa mereka terdaftar dan berhak menerima bantuan. 4).Penyaluran Kartu atau Kupon Jika menggunakan sistem kartu atau kupon, penerima akan diberikan kartu BPNT atau kupon yang dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pangan di toko atau agen yang telah ditunjuk. 5). Belanja dan Pengambilan Barang: Penerima BPNT dapat menggunakan kartu atau kupon mereka untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di toko atau agen yang bekerja sama dengan BPNT / e - warung 6.) Pelaporan dan Dokumentasi: Desa harus melaporkan proses penyaluran bantuan kepada pihak yang berwenang serta memastikan seluruh proses terdokumentasi dengan baik dan di upload di aplikasi SIKS-NG. berikut hasil wawancara dengan Ibu khoiri tentang pendapatnya tentang penyaluran BPNT di Desa Kajeksan.

"*kalo yang saya rasakan masalah disini tidak ada mbak, orang-orang disini pada manut dan ga ribet nurut sama saya kalo misalkan saya bilang gini ya mau-mau aja ga banyak komplen, kalo ada krusakan atau kehilangan kartu ya langsung lapor ke desa"*

Fenomena diatas jika dikaitkan dengan Teori implementasi Edward III dalam Widodo (2010:97), proses penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menunjukkan bahwa komunikasi antara pihak-pihak terkait berjalan dengan cukup efektif. Komunikasi dalam implementasi BPNT mencakup saluran informasi dari pembuat kebijakan (pemerintah pusat) kepada pelaksana kebijakan (dinas sosial dan bank), yang kemudian diteruskan kepada kelompok sasaran (masyarakat penerima). Proses ini terbukti dalam penyaluran BPNT yang lancar, dimana bimbingan teknis dan penyampaian materi pelatihan berjalan dengan baik, sehingga penerima manfaat memahami dan memanfaatkan bantuan dengan benar. Komunikasi yang baik dalam pengelolaan BPNT antara pemerintah, lembaga penyalur, dan masyarakat penerima memudahkan pengawasan dan evaluasi. Penerima manfaat juga aktif menyampaikan tanggapan dan umpan balik mengenai bantuan tersebut, yang membantu perbaikan dan penyempurnaan program. Prinsip penting yang diterapkan dalam penyaluran BPNT adalah pertama, pengelolaan bantuan harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mereka. Kedua, alokasi anggaran untuk pelatihan aparatur dan peningkatan kapasitas petugas sangat penting agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Ketiga, harus ada transparansi dalam penggunaan dana serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Yoan Deman (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi Program BPNT masih menghadapi kendala pada aspek komunikasi, khususnya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur program akibat sosialisasi yang belum optimal. Pada penelitian ini, komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat di Desa Kajeksan telah berjalan cukup baik melalui sosialisasi dan media WhatsApp.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur BPNT secara menyeluruh. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek komunikasi masih memerlukan peningkatan agar informasi mengenai mekanisme program dapat dipahami secara merata oleh seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan BPNT di tingkat desa secara umum melibatkan aparatur desa, pendamping sosial, serta agen e-warong sebagai bagian dari struktur pelaksana program.yang berperan dalam proses pendataan serta pendampingan masyarakat.

Meskipun sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program telah Meskipun sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program telah menjalankan tugasnya dengan baik, masih ditemukan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Beberapa aparat desa mengalami kesulitan dalam melakukan pembaruan data penerima bantuan karena keterbatasan pemahaman teknis terhadap sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah pelaksana, tetapi juga mencakup kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem pendukung program.

Dalam perspektif Edward III, kecukupan sumber daya mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, dan fasilitas pendukung. Keterbatasan pada salah satu aspek tersebut dapat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, kendala teknis yang terjadi menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi BPNT belum sepenuhnya optimal.

Sumber daya ini memiliki berbagai kualitas termasuk keterampilan, keahlian, pengetahuan, dan wawasan. Konsekuensinya, hasil atau keterampilan yang dicapai Pemerintah Desa harus mengarah pada kompetensi dan efisiensi yaitu harus mengerti kebutuhan masyarakat desa. dari hasil wawancara bersama Bapak Suprapto selaku Sekretaris Desa Kajeksan yang menyatakan bahwa :

"Jadi kan dari dulu pendataan masyarakat itu manual, terus sekarang semuanya serba online, jadi pasti ada tantangan tersediri lah mengenai itu, apalagi disini kan ga semua orang faham akan pelayanan online, meskipun aplikasi biasa di kategorikan mudah, kadang ada yang perlu waktu lebih lama untuk belajar. Selain itu juga perlu memastikan aplikasi selalu berfungsi dengan baik, jadi saya harus benar-benar memilih perangkat desa yang cocok untuk program BPNT ini, selain itu pemerintah desa juga harus bekerja sama dengan warung agar program BPNT ini berjalan dengan lancar, kebetulan ada di dusun godekan itu pak rt punya toko jadi dia mengajukan izin ke dinsos sama bank jadilah sekarang di desa kajeksan Agen BPNT nya di Dusun Godekan Rt 04/rw 04.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses digitalisasi sistem pendataan melalui aplikasi SIKS-NG membawa perubahan dalam mekanisme pengelolaan data penerima bantuan. Meskipun sistem digital diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta akurasi pendataan, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa kesenjangan keterampilan teknologi serta kebutuhan adaptasi aparatur desa terhadap sistem pelayanan berbasis digital. Pelaksana penyaluran program BPNT di Desa Kajeksan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pelaksana Penyaluran Program BPNT di Desa Kajeksan

NO	Nama	Jabatan	Tugas
1	Bapak M. Indra Wahyu S.	Kepala Dusun	Melakukan pendataan dan pelaporan terkait penyaluran BPNT di Desa Kajeksan melalui aplikasi Siks-NG
2	Bapak Suprapto	Sekretaris Desa	Mengelola administrasi serta membantu koordinasi pelaksanaan program BPNT di tingkat desa
3	Ibu Khoiri	Agen BPNT	Pemilik E-warung sebagai sarana tranksasi dana BPNT dan membeli sembako KPM

Sumber : Hasil Penelitian, 2024

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan melibatkan beberapa aktor yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses implementasi kebijakan. Kepala dusun berperan dalam melakukan pendataan, verifikasi, serta pelaporan data penerima manfaat melalui aplikasi SIKS-NG. Peran tersebut sangat penting karena data penerima bantuan menjadi dasar utama dalam menentukan ketepatan sasaran program BPNT. Dengan adanya pendataan dan pelaporan yang dilakukan secara berkala, pemerintah desa dapat mengetahui kondisi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Selain kepala dusun, sekretaris desa juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan program BPNT, yaitu mengelola administrasi serta membantu koordinasi pelaksanaan program di tingkat desa. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Sekretaris desa juga membantu dalam proses komunikasi antara pemerintah desa dengan pihak terkait lainnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah dan terorganisir.

Sementara itu, agen BPNT atau e-warung berperan sebagai pihak penyalur bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Agen BPNT menyediakan bahan pangan yang dapat dibeli menggunakan bantuan yang diterima oleh masyarakat. Keberadaan e-warung tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi bantuan, tetapi juga menjadi sarana yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pangan pokok secara lebih mudah dan terjangkau.
Keterlibatan beberapa aktor dalam implementasi program BPNT menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak dapat dilakukan secara individual, melainkan membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi yang baik antar pihak terkait. Setiap aktor memiliki fungsi yang saling berkaitan sehingga apabila salah satu pihak tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka proses penyaluran bantuan dapat mengalami hambatan. Oleh karena itu, sinergi antaraktor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program BPNT di tingkat desa.

Diagram berikut menggambarkan hubungan antaraktor dalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan. Diagram tersebut menunjukkan keterkaitan peran antara kepala dusun, sekretaris desa, agen BPNT, serta masyarakat penerima manfaat dalam proses pelaksanaan program. Selain itu, diagram juga memperlihatkan alur koordinasi dan hubungan kerja antaraktor dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat

Berdasarkan diagram tersebut dapat dilihat bahwa implementasi program BPNT melibatkan beberapa aktor yang memiliki peran berbeda dalam proses pelaksanaan kebijakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan serta penyaluran dana bantuan. Selanjutnya, Dinas Sosial di tingkat daerah berperan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program dengan pemerintah desa.

Di tingkat desa, aparatur desa dan kepala dusun bertugas melakukan pendataan serta pembaruan data penerima manfaat melalui aplikasi SIKS-NG. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam proses penyaluran bantuan yang dilakukan melalui agen BPNT atau e-warung sebagai tempat transaksi bagi masyarakat penerima manfaat.

Diagram ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi BPNT tidak hanya bergantung pada satu aktor saja, tetapi merupakan hasil dari koordinasi antar lembaga serta dukungan sumber daya yang memadai pada setiap tingkat pelaksanaan kebijakan.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam proses pendataan masih menghadapi berbagai kendala teknis. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Indra selaku Kepala Dusun Kajeksan sebagai berikut:

"Kendala aplikasi SIKS-NG biasanya itu sering banget eror dan lemot contohnya sering banget udah hapus data masyarakat KPM yang sudah meninggal tapi datanya masih ada di aplikasnyu, kadang juga ada data yang double, tapi bagaimana pun itu kami selalu berusaha semaksimal mungkin agar program BPNT trus berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara ketersediaan sistem teknologi sebagai sumber daya pendukung dengan efektivitas pemanfaatannya di tingkat implementasi. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan sistem digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data penerima bantuan. Namun di sisi lain, gangguan teknis pada sistem seperti data ganda serta keterlambatan pembaruan data menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Selain faktor teknis sistem, pelaksanaan program BPNT juga didukung oleh keberadaan agen e-warung yang menjadi tempat transaksi bantuan bagi masyarakat penerima manfaat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Khoiri selaku agen BPNT sebagai berikut:

"Dari sebelum ada program BPNT saya jualan mbak, ya ga sulit sih soalnya orang-orang disini juga manut Insyaallah ndak ada kesulitan untuk saya, nasabah saya disini dulu itu ada sekitar 250 orang dari desa lain juga kesini sampai layani 3-4 hari terus semboko-sembako datang 1 truk kesini,mungkin orang-orang tau kalau di sini kan saya menyediakan barang bagus sesuai dengan harga pasar, kalau di tempat lain biasanya paketan sembakonya sudah di pilihi kalau disini mau ambil beras boleh, ambil telur, boleh,ambil ikan boleh pokonya Rp200.000 kalo sekarang enak mbak bebas bisa juga kartunya di gesek ambil uangnya"

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan agen BPNT turut mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan pangan di tingkat desa. Fleksibilitas dalam pemilihan bahan pangan juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Selain itu, masyarakat penerima manfaat juga merasakan kemudahan dengan adanya agen e-warung yang berada di wilayah desa. Hal tersebut disampaikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu Ibu Sulastri warga di Dusun Godekan sebagai berikut:

"Kalau pencairan biasanya kami langsung ke e-warung yang ada di dusun. Di sana kami bisa memilih sendiri kebutuhan yang ingin dibeli seperti beras atau telur, jadi lebih mudah."

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberadaan agen BPNT sebagai fasilitas pendukung turut membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan pangan di tingkat desa. Fleksibilitas dalam pemilihan bahan pangan juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga.

Fenomena di atas apabila Apabila dikaitkan dengan model implementasi kebijakan George
C. Edward III, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya dalam implementasi BPNT di Desa Kajeksan mencakup sumber daya manusia, informasi, kewenangan, serta fasilitas pendukung. Meskipun program telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem digital serta gangguan teknis pada aplikasi SIKS-NG yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Bagi et al. (2023) yang menemukan adanya kendala teknis berupa kartu error, saldo kosong, dan data ganda dalam implementasi BPNT. Pada penelitian di Desa Kajeksan juga ditemukan permasalahan serupa, yaitu gangguan pada aplikasi SIKS-NG, data ganda, serta keterlambatan pembaruan data penerima manfaat. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa aspek sumber daya, khususnya fasilitas teknologi dan sistem informasi, masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program BPNT di berbagai daerah.

C. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program. Berdasarkan hasil penelitian, aparatur desa di Desa Kajeksan menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), khususnya dalam membantu masyarakat memahami mekanisme penyaluran bantuan.

Sikap responsif pelaksana terlihat dari upaya aparatur desa dalam membantu masyarakat ketika mengalami kendala dalam proses pencairan bantuan. Aparatur desa juga berperan aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait jadwal pencairan bantuan serta mekanisme penggunaan kartu bantuan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan dalam penanganan masalah administrasi, seperti keterlambatan pembaruan data penerima bantuan atau proses penyelesaian kendala pada kartu bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara komitmen pelaksana kebijakan yang dinilai cukup baik dengan kecepatan pelayanan dalam menangani permasalahan administrasi yang masih perlu ditingkatkan.

Dalam perspektif model implementasi kebijakan Edward III, disposisi pelaksana kebijakan mencakup sikap, komitmen, kejujuran, serta responsivitas pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Apabila pelaksana memiliki sikap positif dan komitmen yang tinggi terhadap kebijakan, maka implementasi program cenderung berjalan lebih efektif. Namun demikian, disposisi yang baik juga perlu didukung oleh kemampuan pelaksana dalam memberikan pelayanan yang cepat dan responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan.

Selain peran aparatur desa, keberadaan agen BPNT atau e-warung di Desa Kajeksan juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program BPNT. Agen BPNT berfungsi sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat penerima manfaat serta menjadi sarana transaksi bantuan non-tunai. Selain itu, agen BPNT juga berperan dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta melaporkan berbagai kendala yang terjadi kepada pemerintah desa.

Berdasarkan hasil wawancara, proses koordinasi antara pemerintah desa, agen BPNT, serta masyarakat penerima manfaat dinilai berjalan cukup baik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Indra sebagai berikut:

"Orang-orang sekarang itu pada ngerti media massa jadi pinter cari informasi tentang pencairan BPNT. Mereka sudah bisa memantau jadwal pencairan bantuan melalui situs web dan media sosial jauh sebelum waktu pencairan tiba. Keberadaan BPNT yang transparan dan aksesibilitas online ini mempermudah mereka dalam memperoleh informasi. Pemerintah desa juga aktif menjalin komunikasi yang baik dengan agen BPNT untuk memastikan kerja sama yang efektif. Jika ada permasalahan dari KPM, agen BPNT segera melapor ke desa, yang kemudian ditindaklanjuti hingga ke pusat. Saya juga memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur dengan baik dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya"

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat desa memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan program BPNT serta berupaya menjaga koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain itu, dari sudut pandang masyarakat penerima manfaat, pelayanan yang diberikan oleh agen BPNT juga dinilai cukup baik. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh KPM yaitu Ibu Khusnul yang menyatakan bahwa:

"Pelayanannya baik mbak, apalagi bahan-bahan yang dijual di toko Bu Khoiri sama saja seperti yang saya beli di pasar, kualitasnya bagus. Biasanya kalau bantuan seperti ini berasnya banyak kutunya, tapi di sini kualitasnya bagus."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan agen BPNT turut memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam hal kualitas bahan pangan yang diterima.

Selain itu, beberapa KPM juga menyampaikan bahwa meskipun pelayanan yang diberikan oleh agen BPNT dan aparatur desa dinilai cukup baik, masih terdapat kendala dalam proses penyelesaian permasalahan administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh KPM yaitu Ibu Januari sebagai berikut:

"Kalau pelayanan di warungnya sih baik mbak, kalau belanja juga bebas pilih sembako. Tapi kadang kalau ada masalah di kartu atau saldo kosong itu harus menunggu dulu sampai diperbaiki datanya dari atas."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat pada dasarnya merasa terbantu dengan keberadaan program BPNT serta pelayanan yang diberikan oleh agen BPNT. Namun demikian, kendala administratif seperti saldo bantuan yang belum masuk atau permasalahan pada kartu bantuan masih menjadi hambatan yang dirasakan oleh sebagian penerima manfaat.

Fenomena di atas apabila dikaitkan dengan model implementasi kebijakan Edward III, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara sikap positif pelaksana kebijakan dengan efektivitas pelayanan dalam menangani permasalahan administrasi. Di satu sisi, aparatur desa dan agen BPNT menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung pelaksanaan program. Namun di sisi lain, beberapa kendala seperti keterlambatan penanganan masalah data penerima bantuan menunjukkan bahwa disposisi pelaksana yang baik belum sepenuhnya diikuti oleh sistem pelayanan yang cepat dan efisien.

Temuan penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Wildayantai (2023) yang menyatakan bahwa implementasi BPNT telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Di Desa Kajeksan, aparatur desa dan agen BPNT juga menunjukkan komitmen serta sikap responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala administratif yang menyebabkan penyelesaian beberapa permasalahan membutuhkan waktu lebih lama. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu sekaligus menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan responsivitas dalam pelayanan administrasi.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas, mekanisme koordinasi antar pelaksana, serta keberadaan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedures/SOP) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Struktur birokrasi yang jelas dan terorganisasi dengan baik dapat mempermudah proses implementasi kebijakan, sedangkan struktur yang terlalu kompleks berpotensi menimbulkan hambatan administratif.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan melibatkan beberapa aktor pelaksana yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan program tidak hanya berada pada tingkat pemerintah desa tetapi agen penyalur bantuan (e-warung), serta instansi pemerintah di tingkat kecamatan dan kabupaten. Pemerintah desa berperan dalam proses pendataan awal masyarakat, verifikasi kondisi sosial ekonomi warga, serta penyampaian informasi kepada masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, pendamping sosial bertanggung jawab dalam melakukan pendampingan teknis, monitoring pelaksanaan program, serta membantu masyarakat ketika mengalami kendala dalam proses pencairan bantuan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan memiliki struktur birokrasi yang melibatkan beberapa aktor dengan tugas dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Struktur birokrasi tersebut menunjukkan hubungan koordinasi antarlembaga dalam mendukung kelancaran implementasi program BPNT. Adapun struktur birokrasi pelaksanaan Program BPNT di Desa Kajeksan dapat dilihat pada gambar berikut.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

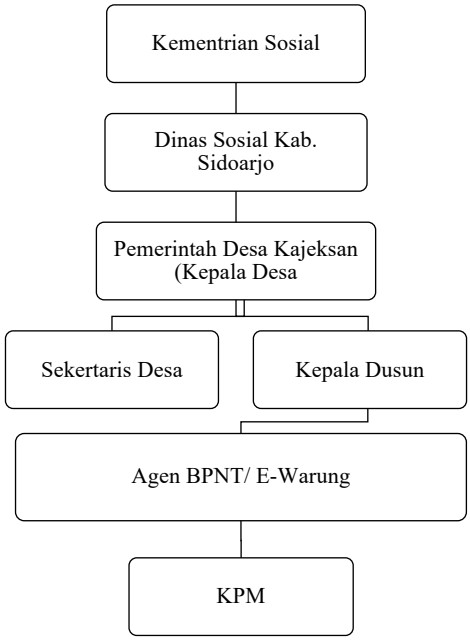

Gambar 1.3 Struktur Birokrasi BPNT Pelaksanaan Program (BPNT) di Desa Kajeksan

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Struktur birokrasi pelaksanaan BPNT di Desa Kajeksan dimulai dari Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab kebijakan, kemudian Dinas Sosial Kabupaten sebagai koordinator pelaksanaan di daerah. Selanjutnya Pemerintah Desa Kajeksan melalui Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun bertanggung jawab dalam proses pendataan, verifikasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Adapun Agen BPNT (e-warong) berperan sebagai pelaksana penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Struktur tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dan kewenangan yang jelas sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Program BPNT.

Pembagian tugas tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi BPNT telah tersusun secara formal sesuai dengan ketentuan pelaksanaan program. Kejelasan peran antar pelaksana membantu meminimalkan tumpang tindih kewenangan serta memungkinkan proses implementasi berjalan secara lebih sistematis. Aparatur desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sedangkan pendamping sosial berperan sebagai pelaksana teknis yang memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Indra dalam hasil wawancara berikut:

"kalau disini SOP pencairan dan BPNT udah sesuai, kalau ada pemberitahuan dari pusat dana BPNT nya udah cair ya langsung diproses besok harinya, pokoknya tinggal ikutin aturan dari pusat aja insyaallah di pastikan prosesnya transparan dan tepat sasaran, sehingga bantuan sampai ke tangan yang tepat dan bermanfaat untuk KPM."

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program BPNT di Desa Kajeksan telah berpedoman pada prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Keberadaan SOP memberikan pedoman yang jelas bagi para pelaksana dalam menjalankan setiap tahapan program, mulai dari proses pendataan hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat.

Namun demikian, hasil observasi dan wawancara lapangan juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam proses koordinasi antar pelaksana kebijakan. Dalam beberapa kasus, proses pembaruan data penerima manfaat memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui beberapa jenjang birokrasi. Data masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi harus diajukan terlebih dahulu oleh pemerintah desa, kemudian diverifikasi oleh pendamping sosial, dan selanjutnya diproses melalui sistem pusat sebelum dapat diperbarui secara resmi.

Proses administratif yang panjang tersebut menyebabkan pembaruan data tidak dapat dilakukan secara cepat. Akibatnya, masih ditemukan masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara keberadaan struktur birokrasi yang secara formal telah tersusun dengan baik dengan efektivitas koordinasi yang masih menghadapi hambatan dalam praktiknya.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Edward III yang menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang terlalu panjang dapat menimbulkan fenomena fragmentation, yaitu terpecahnya tanggung jawab implementasi kebijakan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

ke dalam berbagai unit organisasi yang berbeda. Fragmentasi birokrasi berpotensi menyebabkan proses koordinasi menjadi kurang efisien serta memperlambat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, keberadaan prosedur operasional standar (SOP) dalam pelaksanaan BPNT sebenarnya telah memberikan pedoman kerja yang jelas bagi para pelaksana kebijakan. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan SOP terkadang bersifat kaku dan kurang fleksibel terhadap kondisi sosial masyarakat di lapangan. Aparatur desa tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah data penerima manfaat secara mandiri, meskipun mereka mengetahui kondisi riil masyarakat yang membutuhkan bantuan. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan diskresi pelaksana kebijakan di tingkat lokal.ari sisi masyarakat penerima manfaat, struktur birokrasi yang berlapis juga memengaruhi kecepatan penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam proses pencairan bantuan. Salah satu KPM yaitu Ibu Rahma menyampaikan bahwa:

"Kalau ada masalah di kartu atau bantuan belum masuk biasanya harus menunggu dulu, mbak. harus dilaporkan ke mas indra dulu baru nanti diproses lagi dari atas, jadi kadang agak lama."

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat penerima manfaat masih merasakan adanya keterlambatan dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan administrasi program. Kondisi ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa proses pelayanan berjalan lambat, meskipun secara prosedural pelaksana di tingkat desa telah menjalankan tugasnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur birokrasi yang jelas, tetapi juga oleh tingkat efisiensi koordinasi serta fleksibilitas mekanisme kerja di dalamnya. Struktur birokrasi yang terlalu hierarkis dapat mengurangi responsivitas pelaksana kebijakan terhadap berbagai permasalahan yang muncul di lapangan.

Dalam konteks implementasi BPNT di Desa Kajeksan, struktur birokrasi pada dasarnya telah memberikan kerangka kerja yang cukup jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksana kebijakan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan koordinasi lintas pelaksana serta penyederhanaan prosedur administratif agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat dan responsif.

Fenomena di atas jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Edward III menjelaskan bahwa struktur birokrasi yang efektif ditandai dengan adanya pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik antar pelaksana, serta keberadaan prosedur operasional standar (SOP) yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi Program BPNT di Desa Kajeksan, struktur birokrasi secara formal telah terbentuk dengan cukup baik, yang ditunjukkan melalui pembagian peran antara pemerintah desa, pendamping sosial, agen BPNT, serta instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Keberadaan SOP juga memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksana dalam menjalankan program. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, temuan penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam aspek struktur birokrasi, khususnya terkait proses koordinasi yang harus melalui beberapa jenjang administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena fragmentation sebagaimana dijelaskan oleh Edward III, yaitu terpecahnya tanggung jawab implementasi kebijakan ke dalam beberapa unit organisasi yang berbeda sehingga proses koordinasi menjadi lebih kompleks. Fragmentasi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan maupun dalam proses penyelesaian permasalahan yang dialami oleh masyarakat penerima manfaat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Program BPNT di Desa Kajeksan telah berjalan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan efisiensi koordinasi antar pelaksana agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih cepat dan responsif. Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Bagi et al. (2023), yang menunjukkan bahwa proses penyaluran BPNT masih menghadapi hambatan administratif, seperti pergantian data penerima manfaat dan proses pencairan bantuan. Pada penelitian ini, kendala tersebut juga ditemukan dalam proses pembaruan data yang harus melalui beberapa jenjang birokrasi sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi Program BPNT di Desa Kajeksan telah berjalan sesuai dengan ketentuan formal yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan efisiensi koordinasi antar pelaksana agar proses pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih cepat dan responsif

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Implemenatsi Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Kajeksan berikut kesimpulan dan saran yang didapat,serta di kontraskan dengan kenyataan di lapangan

Pertama, aspek komunikasi. Komunikasi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Kajeksan sangat penting untuk memastikan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik. Proses komunikasi antara pemerintah, pelaksana kebijakan, dan masyarakat penerima manfaat harus dilakukan secara efektif agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra dan Ibu Khoiri, komunikasi dalam penyaluran BPNT di Desa Kajeksan sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah desa telah melakukan sosialisasi

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..

serta penyaluran bantuan secara rutin setiap bulan sehingga masyarakat penerima manfaat dapat memahami mekanisme penyaluran bantuan. Namun demikian, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, pemerintah desa disarankan untuk melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat penerima manfaat terkait mekanisme penyaluran BPNT, penggunaan kartu bantuan, serta prosedur pengaduan apabila terjadi kendala dalam penerimaan bantuan. Selain itu, perlu adanya media informasi seperti papan pengumuman desa atau grup komunikasi masyarakat agar informasi terkait penyaluran BPNT dapat diterima secara merata oleh seluruh KPM.Kedua, aspek sumber daya. Sumber daya dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Kajeksan memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yang meliputi sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan fasilitas pendukung. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk melaksanakan program di lapangan, sedangkan sumber daya keuangan berkaitan dengan pendanaan program BPNT. Selain itu, sumber daya waktu berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan program dan sumber daya fasilitas mendukung kelancaran implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan BPNT, kemampuan pelaksana dalam mengoperasikan aplikasi SIKS-NG serta sikap tanggung jawab menjadi indikator penting dalam menunjang keberhasilan program. Oleh karena itu, pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi SIKS-NG serta pengelolaan data penerima bantuan. Selain itu, perlu adanya peningkatan fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan perangkat administrasi agar proses pembaruan data dan pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan akurat. Ketiga, aspek disposisi. Disposisi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai di Desa Kajeksan menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik antara Pemerintah Desa Kajeksan, agen BPNT, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sebagaimana disampaikan oleh Bapak Indra. Pemerintah Desa Kajeksan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mendukung implementasi program BPNT. Para KPM juga mengakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pelaksana program cukup baik serta kualitas bahan pangan yang diterima dinilai layak. Meskipun demikian, pemerintah desa perlu terus menjaga komitmen dan koordinasi antara pelaksana program dengan agen BPNT melalui pertemuan evaluasi secara berkala untuk membahas kendala yang terjadi dalam penyaluran bantuan. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengaduan yang jelas bagi KPM apabila terdapat permasalahan dalam penerimaan bantuan agar pelayanan program BPNT dapat terus ditingkatkan. Keempat, aspek struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Terdapat dua aspek utama dalam struktur birokrasi, yaitu mekanisme pelaksanaan kebijakan serta struktur organisasi pelaksana. Mekanisme implementasi program BPNT umumnya telah diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam menjalankan program agar tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi pelaksana yang sederhana dan jelas juga mempermudah proses koordinasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Desa Kajeksan pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari komunikasi yang berjalan antara pemerintah desa dan masyarakat, adanya koordinasi antara pelaksana program, serta pelaksanaan penyaluran

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo serta Pemerintah Desa Kajeksan beserta seluruh informan yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi selama proses penelitian

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, khususnya kakak tercinta, atas doa, dukungan, perhatian, motivasi, serta pengorbanan yang diberikan selama proses penyelesaian penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih dan penghormatan yang mendalam juga penulis persembahkan kepada almarhum kedua orang tua tercinta yang telah menjadi sumber inspirasi, kasih sayang, serta semangat dalam menempuh pendidikan. Semoga segala kebaikan, doa, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt.Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

REFERENSI

[1] Alam, A. Z. I., Zaid, M., & Alam, A. A. F. (2023). Digitalisasi sistem perlindungan sosial kebijakan di Indonesia sebagai langkah menuju masyarakat 5.0. *Journal Social Society*, *3*(2), 95–112.

[2] Amanda, P. D., Najwa, Y., & Safiq, A.-. (2024). Analisis efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Indonesia. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, *2*(1), 1–20.

[3] Ariyanto, D., Wantu, S. M., & Aneta, Y. (2021). Implementasi bantuan pangan non tunai di Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, *2*(11), 1847–1855.

[4] Diana, F., & Putri, W. (2023). Peran perangkat desa dalam menjaga stabilitas sosial dan memberikan pelayanan publik di Desa Jubung. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, *3*(4). Edward III, G. C. (1984). *Public policy implementation*. JAI Press.

[5] Fardi, M., & Pratama, I. N. (2023). Transparansi pendataan program bantuan sosial tunai dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, *3*(3).

[6] Galvin, G., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengawasan, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, kompetensi aparatur, sarana prasarana, dan efektivitas bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 di Kota Surakarta. *Inovasi*, *17*(3), 410–416.

[7] Imanuddin, M., Saraan, K., Suwitri, S., & Yuniningsih, A. P. T. (2019). Analisis faktor penghambat implementasi alokasi dana desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik*, *9*(2), 151–157.

[8] slami, S., & Mursyidah, L. (2024). Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam mensejahterakan masyarakat di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *14*(4), 532–546.

[9] Mahmudah, N., & Rahman, A. (2025). Implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *JAPB*, *8*(1), 334–341.

[10] Nursholihah, I. (2022). Efektivitas penyaluran bantuan sosial non tunai oleh pemerintah desa bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Neglasari. *Universitas Galuh*, 4354–4365.

[11] Pratama, A. P., Manar, D. G., & Supratiwi. (2024). Implementasi kebijakan program sembako di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang tahun 2023. *Journal of Politic and Government Studies*, *13*(2). Rismawati, R., Yunus, R., Sading, Y., & Yunus, S. (2025). Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Birobuli Selatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(8), 5340–5350. https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8343

[12] Riwu, F. T. H., Riswanda, & Nursalam. (2025). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga terhadap gagal salur program bantuan sosial di Kabupaten Sabu Raijua. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs*, *8*(2), 784–800.

[13] Sulastri, E., & Solihin, D. (2025). Implementasi penyaluran program bantuan pangan non tunai pada masyarakat Desa Gunung Masigit. *Jurnal Pelita Nusa: Sosial Dan Humaniora*, *5*(1), 28–45.

[14] Wahyuni, W., Dwiarto, R., Ronida, S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi kebijakan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, *5*(2).

[15] Zulfia, H., Endrawan, G., Rosika, C., & Frinaldi, A. (2023). Implementasi kebijakan inovasi daerah dalam peningkatan kinerja organisasi pada pemerintah Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi*, *14*(2), 171–184

Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.
Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted..